

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu daerah. Khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum serta pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan negara melalui sektor *internal* yaitu pajak. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari 16 jenis pajak yaitu 5 (lima) pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah yang merupakan pajak provinsi.

Sesuai dengan Undang - Undang No. 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengingat kendaraan bermotor Menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki bagi individu maupun lembaga untuk menunjang kegiatannya, hal ini menyebabkan tingkat penggunaan kendaraan bermotor sangat tinggi yang berdampak pada tingginya jumlah Pendapatan Asli Daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi dibantu oleh beberapa kantor cabang salah satunya adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data dari UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo, pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya berpotensi mengalami peningkatan dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 1

Objek dan Potensi Pendapatan Asli Daerah Sidoarjo

Tahun	Kendaraan roda 2 (dua)		Kendaraan roda 4 (empat)	
	Objek	Potensi	Objek	Potensi
2015	1.166.440	185.868.243.525	169.977	286.011.365.867
2016	1.254.631	204.804.322.275	187.013	330.945.193.992
2017	1.327.942	221.412.519.674	204.097	378.879.830.093
2018	1.413.942	241.142.317.325	222.090	340.698.623.492

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018 potensi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan objek kendaraan bermotor sehingga mengalami kenaikan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Menyadari hal tersebut, wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT dikarenakan sangat berperan dalam pemungutan pajak. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polisi, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Menurut Kepala Bapenda Jawa Timur, Bobby Soemarsono mengatakan bahwa total kendaraan di Jawa Timur sekitar 17. 913.998 unit. Dari jumlah tersebut, yang tidak patuh dalam membayar pajak tahunan sebesar 8.5 persen atau sekitar 1.480.000 kendaraan. Sementara yang tidak membayar pajak selama 5 (lima) tahun sebesar 21 persen atau 3.785.000 kendaraan, (jatimtribun.com, 20/10/2017).

Penyebab ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya wajib pajak sibuk dengan pekerjaannya sehingga menunda-nunda untuk membayar pajak, wajib pajak membeli kendaraan bermotor bekas / *second* dengan atas nama pemilik

kendaraan bermotor tangan pertama. Pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak merasa kesulitan dalam prosedur pembayaran dikarenakan kendaraan bermotor bukan atas nama pribadi. Sedangkan dalam prosedur pembayarannya wajib menyertakan KTP dan STNK asli atas nama pribadi. Jika wajib pajak ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib melakukan balik nama agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor . program bea balik nama sendiri memerlukan biaya yang cukup besar sehingga memberatkan wajib pajak. oleh karena itu wajib pajak tidak melakukan proses balik nama dan tidak membayar pajak sehingga menunggak dalam pembayaran pajak.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih terbilang sangat rendah. Rendahnya tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak kendaraan sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Keadaan ini menimbulkan alasan diadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Oleh Karena itu ditetapkan kebijakan Pemutihan yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 88 tahun 2018 tentang pemberian keringanan pembebasan pajak kendaraan untuk rakyat Jawa Timur tahun 2018.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu upaya dan tindakan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan menertibkan wajib pajak yang lama tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan dengan cara menghapuskan sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, agar pembaca mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan diatas maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dalam judul “*Peran Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Sidoarjo.*”

1.2. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam tugas akhir ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui peran kebijakan pemutihan dalam pendapatan asli daerah Sidoarjo.

1.3. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang penulis harapan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengaruh kebijakan pemutihan kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Samsat Sidoarjo.

2. Pemerintah

Sebagai kerjasama antara instansi pendidikan dan pemerintah serta sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai kepada pemerintah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan di Samsat Sidoarjo.

3. Pembaca

Sebagai referensi pembelajaran pembaca yang berkaitan dengan peran kebijakan pemutihan pajak kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Samsat Sidoarjo.

1.4. Ruang Lingkup Tugas Akhir

Penulis memberi batasan ruang lingkup tugas akhir dengan menitik beratkan pada permasalahan mengenai peran kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Samsat Sidoarjo, dengan ruang lingkup yang membahas tentang kebijakan pemutihan serta peran pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam tahun 2018 di kantor Samsat Sidoarjo.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis data *deskriptif analisis*. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan mengenai keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam memperoleh data maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada kantor Samsat Sidoarjo, sehingga dapat mencari informasi secara langsung mengenai pelaporan pembayaran kegiatan pelaporan pajak kendaraan bermotor.

2. Wawancara

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan tanya jawab pada pegawai Samsat untuk mendapatkan data yang akurat sebagai acuan penulis dalam perbandingan materi dan realisasi pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan.

3. Studi Pustaka

Penulis melakukan pengumpulan data dari buku maupun mengutip data dari internet. Penulis akan membaca, mengutip dan mencatat sumber data mengenai pajak, pajak daerah serta pajak kendaraan bermotor.

4. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengaji ulang data yang berkaitan tentang pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Samsat Sidoarjo.